

Membangun *Image* Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil: Studi Terhadap NU dan Muhammadiyah

Miski

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: miski@uin-suka.ac.id

Abstract

NU and Muhammadiyah are organizations that represent Islamic civil forces and have a role in the process of consolidating democracy in Indonesia. The largest Islamic organization in Indonesia has experience of interaction with a complete and intact Indonesian historical landscape. Meanwhile, Indonesia has a diversity of religions, ethnicities, races and cultures that are prone to conflict in various regions. Not to mention that Islam itself is often labeled as a terrorist religion with radical views. Then what are the diplomatic roles of the two organizations in building the image of Indonesia and world peace in general? This research is a qualitative research with analytical descriptive type and using library research method. The results of the study show that strengthening moderate Islam through NU and Muhammadiyah, this concerns the interests of continuing democracy and the safety of humanity as a whole. As for what the 2 Islamic organizations are doing, namely: (1) State Grants, (2) Civilization Dialogue and (3) Building a Moderate Diversity Attitude. Thus, the awareness of the diversity of Muslims who are moderate means that Islam is just and full of peace we need to cultivate in order to achieve a friendly Islam, not an angry Islam. Complete understanding of Islam and not half measures. And a peaceful Islamic movement is not a frontal Islamic movement full of violence to achieve power.

Keywords: *Civil Society; Nabdlatul Ulama; Muhammadiyah*

Abstrak

NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang merepresentasikan kekuatan sipil Islam dan memiliki peran dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memiliki pengalaman interaksi dengan lanskap sejarah keindonesiaan yang lengkap dan utuh. Sedangkan Indonesia memiliki keragaman agama, suku, ras dan budaya yang rentan terjadinya konflik di berbagai wilayah. Belum lagi Islam sendiri yang seringkali dilabeli sebagai agama teroris yang memiliki paham radikal. Lalu bagaimana peran-peran diplomasi kedua organisasi tersebut dalam rangka membangun *image* Indonesia dan perdamaian dunia

pada umumnya? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif analitis serta menggunakan metode *library research*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan Islam moderat melalui NU dan Muhammadiyah, hal ini menyangkut kepentingan kelanjutan demokrasi dan keselamatan kemanusiaan secara keseluruhan. Adapun yang dilakukan oleh 2 ormas Islam tersebut yakni: (1) Muhibah Kenegaraan, (2) Dialog Peradaban dan (3) Membangun Sikap Keberagaman yang Moderat. Dengan demikian, kesadaran keberagaman umat Islam yang moderat artinya Islam yang berkeadilan dan penuh kedamaian perlu kita tanamkan untuk menggapai kesadaran Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Pemahaman Islam yang kaffah dan bukan setengah-setengah. Dan gerakan Islam yang damai bukan gerakan Islam yang frontal dan penuh dengan warna kekerasan untuk mencapai kekuasaan.

Kata Kunci: *Masyarakat Sipil; Nahdhatul Ulama; Muhammadiyah*

Pendahuluan

Pasca ledakan bom Bali 2002 dan rentetan kasus-kasus terorisme di Indonesia, telah menjadikan *stereotype* Islam Indonesia. Islam moderat di Indonesia seolah menjadi antitesa atas Islam radikal, sehingga mudah saja mengidentikkan Islam dengan terorisme. Kondisi semacam inipun telah membuat *image* Indonesia “negativ” di dunia internasional. Bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya mendapat tekanan dunia internasional, sebuah negara dengan berpenduduk mayoritas muslim ini dituduh sebagai sarang teroris, ini terbukti dengan dikeluarkannya *travel warnings* oleh beberapa negara asing, khususnya Amerika, Australia dan Inggris kepada warga negaranya untuk tidak lagi bepergian ke Indonesia. Dampak kebijakan politik Internasional tersebut jelas merugikan Indonesia secara ekonomi, politik, pariwisata dan lain-lain.

Perubahan dramatis struktur politik masyarakat internasional pasca aksi terorisme 11 September 2001 ke dua menara kembar Amerika Serikat itu, telah merubah wajah dunia semakin rumit, sebagai negara super power tunggal, AS sekehendak hati menuduh negara-negara yang dianggap memiliki potensi terorisme. Pernyataan George W Bush, “*ether you are with us, or you are with terrorist*” memosisikan Negara berpenduduk muslim kepada kondisi yang dilematis. Sikap semua Negara ditentukan hitam dan putih tak ada lagi wilayah abu-abu (*gray area*) apalagi penerapan *stick and carrot* yang setidaknya telah memberikan pengaruh besar bagi Negara-negara

berpenduduk muslim untuk menata kebijakan politiknya terutama gerakan islam radikal.

Meski peristiwa itu sudah lama berlalu, tetapi akan tetap dan terus dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari kejahatan tingkat dunia (*global crime*) atas kelangsungan kehidupan modern. Terorisme dapat terjadi kapanpun dan di setiap Negara di dunia sebagai akibat dari pengaruh globalisasi di zaman yang serba canggih dan modern saat ini. Aksi-aksi terorisme yang terjadi di seluruh dunia memberikan opini bahwa konotasi teroris itu adalah Islam radikal, opini dunia didominasi oleh AS. Pemberian nama (*labelling*) teroris kepada kelompok Islam tertentu semakin kuat dan meluas sehubungan dengan tuduhan kepada jaringan al-Qaeda adalah jaringan teroris internasional yang terdapat di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. (Akaha et.al., 2002, 31)

Ketika fenomena terorisme itu muncul di Asia Tenggara khususnya Indonesia, banyak tokoh dari dalam dan luar negeri yang berharap agar Islam moderat tampil dan memberikan andil dalam meredam gejolak teror berlabel agama tersebut. Umat Islam di Asia Tenggara, merespon maraknya terorisme berlabel agama dengan menggelar konferensi yang bermaksud meng-counter berkembangnya pengaruh Islam radikal di kalangan umat Islam pada umumnya, dan mencegah terbentuknya opini internasional yang mengidentikkan Islam dengan terorisme. "Deklarasi Jakarta 2001", yang merupakan hasil Summit of World Muslim Leaders mengungkapkan bahwa Islam adalah agama moderat yang cinta damai, antikekerasan, dan tidak antikemajuan. Kemudian The Jakarta International Islamic Conference (JIIC) yang dilaksanakan atas kerjasama NU-Muhammadiyah pada tanggal 13-15 Oktober 2003, yang kemudian melahirkan Center for Moderate Muslim (CMM). Konferensi ini ingin mempertegas peran Islam moderat Asia Tenggara yang direpresentasikan oleh NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya dalam meredam gelombang radikalisme.

NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan *civil society* yang dalam bahasa Hefner (2001), kedua organisasi tersebut merepresentasikan kekuatan sipil Islam yang berperan dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memiliki pengalaman interaksi dengan lanskap sejarah keindonesiaan yang lengkap dan utuh. Keduanya, merupakan organisasi tujuh zaman. Keduanya sama-sama pernah menjalani masa

penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan sekarang era Reformasi. Dilihat dari sudut historisitasnya, keduanya telah berperan cukup besar bagi kelangsungan eksistensi Indonesia. Kini ketika Indonesia dalam kondisi terpuruk terutama dalam hal politik luar negeri, NU dan Muhammadiyah tampil untuk membangun kembali *image* "positif" tentang Indonesia ke dunia internasional.

Makalah ini akan mengkaji peran sosial-politik NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia. Pertama-tama akan dibahas mengenai peran sosial-politik NU dalam sejarah politik Indonesia, dan bagaimana NU dan Muhammadiyah dengan karakter keberagaman yang moderat bahkan menjadi ikon Islam moderat di Asia Tenggara, memainkan peranannya dalam mengkampanyekan Islam anti terorisme, tidak ada terorisme dalam Islam dan lain-lain, Islam adalah agama yang damai, *rahmatan lil 'alamin*, Islam sangat responsif terhadap kemajuan, demokrasi HAM dan lain-lain. Kampanye tersebut dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun ke wilayah internasional, termasuk juga bagaimana peran-peran diplomasi kedua organisasi tersebut dalam rangka membangun *image* Indonesia dan perdamaian dunia pada umumnya.

Peran Sosial-Politik NU dan Muhammadiyah dalam Sejarah Politik Indonesia: Sebuah Kajian Singkat

Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Muhammadiyah menurut Weinata Sairin (1995, 18), yang mengutip James L. Peacock, merupakan gerakan reformasi Islam yang terkuat yang ada di kalangan Asia Tenggara, bahkan mungkin seluruh dunia. Gerakan ini adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. (*Ibid.*)

Faktor-faktor lahirnya gerakan ini menurut Delier Noer (1982, 37) adalah adanya tantangan dari kekuatan-kekuatan kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju setara dengan kekuatan-kekuatan asing tersebut. Syafi'i Ma'arif (1986, 66) menyebut lima faktor yang mendorong kelahiran Muhammadiyah, 1) keterbelakangan serta kebodohan umat Islam Indonesia di hampir

semua aspek kehidupan, 2) kemiskinan yang sangat parah yang diderita umat Islam justru dalam suatu negeri yang kaya seperti Indonesia, 3) keadaan pendidikan Islam yang sangat kuno, sebagaimana bisa dilihat melalui pesantren, 4) adanya pengaruh dari penetrasi dari bangsa-bangsa Eropa, dan 5) adanya kegiatan misi katolik dan protestan. Sementara Alwi Shihab (1998, 125-189) menyebut 7 faktor yang melatarbelakangi kelahiran Muhammadiyah, yaitu 1) gagasan pembaruan Islam Timur Tengah, 2) pembaruan Muhammad Abduh, 3) pertentangan internal dalam masyarakat Jawa, 4) penetrasi Kristen, 5) ordonansi guru, 6) pelanggaran Belanda terhadap kebudayaan lokal, dan 7) pembentukan Freemasonry.

Adapun paham keagamaan Muhammadiyah adalah paham yang menginginkan "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah".¹ Dengan paham purifikasi (pemurnian) ini, Muhammadiyah getol memperjuangkan kemurnian aqidah Islam dari terkontaminasi oleh apa yang mereka sebut dengan *tabayul*, *bid'ah* dan *keburafat* (TBC).

Adapun landasan ideologis sikap dan prilaku politik Muhammadiyah, menurut Alfian (1989, 14) memiliki tiga peran yaitu sebagai gerakan reformasi keagamaan, sebagai *agent of social change*, dan sebagai kekuatan politik.

Sebagai kekuatan politik, Muhammadiyah cukup diperhitungkan dan diperebutkan oleh banyak pihak termasuk negara. Dengan demikian sangat dimungkinkan para aktifis dan pemimpin organisasi ini untuk 'tergoda' terjun ke dunia politik. Hal itu memang sah-sah saja karena meskipun Muhammadiyah bukan partai politik tapi tidak mungkin Muhammadiyah lepas sama sekali dari politik. Karena dimungkinnya para aktifis dan pimpinan Muhammadiyah terjun ke politik dan mao tidak mao mereka membawa nama Muhammadiyah, maka seharusnya mereka menjunjung norma-norma yang menjadi landasan prilaku politik Muhammadiyah. Landasan prilaku politik Muhammadiyah adalah sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar yakni *Amar Ma'ruf Nabi Munkar*.

Sementara untuk menemukan karakter utama tindakan politik Muhammadiyah memang tidak mudah karena bisa berubah-ubah dari

¹ Lihat Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab I pasal 1 ayat (1) yang menyatakan "Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah *Amar Ma'ruf Nabi Munkar* berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah.

waktu ke waktu dan dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Tetapi paling tidak menurut Alfian (1989, 347-351) terdapat tiga variasi tindakan politik Muhammadiyah, yaitu *pertama*, antikekerasan/antikolonialisme. *Kedua*, tindakan politiknya dalam bingkai gerakan nasionalisme Indonesia, dan *ketiga*, kemunculan Muhammadiyah adalah turut serta aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan menjadi suatu komunitas muslim Indonesia.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah berpaut erat dengan perjuangan kebangsaan dan keindonesiaan. Secara khusus, Bung Karno memberikan apresiasi tinggi terhadap peran Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dalam perintisan gagasan nasionalisme bangsa. Presiden pertama Republik Indonesia ini menyebut Ahmad Dahlan sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pergulatan intelektualismenya disamping H.O.S. Cokroaminoto (2001:178). Pada masa kemerdekaan, Muhammadiyah berada di garis terdepan dalam proses perumusan dasar negara. Inklusivitas Muhammadiyah yang ditunjukkan Kasman Singodimejo, tokoh penting Muhammadiyah pada masa awal kemerdekaan, dalam perumusan Pancasila menjadi kunci bagi lahirnya negara Indonesia yang majemuk. Kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial telah berhasil menopang program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Muhammadiyah dikenal sebagai satu organisasi sosial keagamaan mainstream yang memiliki komitmen terhadap gagasan keadaban sosial dan kebangsaan yang majemuk.

Muhammadiyah pada masa selanjutnya, menghindar diri dari kungkungan politik praktis, peristiwa historis apa yang menimpa Masyumi pada masa demokrasi terpimpin ini, telah membuat sadar fungsionaris Muhammadiyah sehingga dirasa Muhammadiyah harus keluar dari Parpol. Muhammadiyah kemudian lebih meningkatkan intensitas aksinya dalam konteks alokasi nilai. Yang disebut oleh Amien Rais sebagai *high politics*. Yakni berupaya menanamkan nilai-nilai *akhlak al-karimah* ke dalam perilaku sosial-politik, bahkan perilaku sektor lainnya seperti ekonomi dan bisnis.

Sedangkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tahun 1926 oleh sejumlah tokoh ulama' tradisional. Berawal dari undangan yang disampaikan oleh Komite Hijaz, maka berkumpullah

para ulama² di kampung Kartopaten Surabaya, yaitu rumah KH. Wahab Hasbullah. Dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar

Menurut Bruinessen (1994, 17), kelahiran NU seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis, Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Sarekat Islam (SI).³ Lebih lanjut Bruinessen menjelaskan, selain faktor di atas ada faktor lain yang turut melatarbelakangi berdirinya NU, yaitu perkembangan politik Islam internasional berupa penghapusan kekhalifahan di Turki, serbuan kaum Wahabi atas Mekkah dan pencarian suatu internasionalisme Islam yang baru (*Ibid*, 28).

NU menganut paham *Ahl al-sunah wa al-jama'ah* (Aswaja), sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *'aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Rujukan pemikiran NU setidaknya terbagi menjadi tiga: 1) Dalam bidang fikih, menganut ajaran-ajaran dari salah satu mazhab empat

² Sejumlah ulama' yang hadir dalam acara tersebut, Chairul Anam (1994, 33-38) menjelaskan, diantaranya adalah KHM. Hasyim Asy'ari (Tebuireng Jombang), KH. Abdul Wahab Hasbullah (Tambakberas Jombang), KH. Bisri Syansuri (Denanyar Jombang), KH. Asnawi (Kudus), KH. Nawawi (Sidogiri Pasuruan), KH. Ridwan (Semarang), KH. Ma'sum (Lasem), KH. Nahravi (Malang), KH. Munthaha (Bangkalan Madura, menantu KHM. Khalil), KH. Abdul Hamid Faqih (Sedayu Gresik), KH. Abdul Halim (Lewimunding Cirebon), KH. Ridwan Abdullah (Surabaya), KH. Abdullah Ubaid (Surabaya), KH. Mas Alwi (Surabaya), Syekh Ahmad Ghana'im al-Mishri (Mesir), dan ulama'-ulama' lain yang tidak tercatat namanya.

³ Pengaruh Muhammadiyah dan Syarikat Islam yang semakin meluas, telah memarginalisasikan kyai, yang sebelumnya merupakan satunya-satunya pemimpin dan juru bicara komunitas muslim, dan ajaran kaum pembaru sangat melemahkan legitimasi mereka (Bruinessen, 1994, 26-27). Tesis ini memang benar, akan tetapi Bruinessen tidak menjelaskan, kenapa NU didirikan pada 1926 dan tidak lima atau sepuluh tahun lebih awal ketika Syarikat Islam sedang giat-giatnya dan ketika banyak keluhan terhadap pembaru yang agresif menyebarkan ajarannya di Jawa.

yang dalam prakteknya para kyai adalah penganut kuat mazhab syafi'i. 2) Dalam bidang teologi, menganut ajaran-ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan 3) Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam al-Ghazali dan Imam Abu Qasim al-Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. (Damam, 2001, 59-60).

Jadi mazhab *Ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang dianut NU merupakan pendekatan yang multidimensional dari sebuah gugusan konfigurasi aspek-aspek kalam, fikih dan tasawuf. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh, masing-masing tidak dipilah dan trikotomi yang satu berbeda atau berlawanan dengan yang lain. Meskipun demikian tidak seluruh prilaku NU mampu mengapresiasi kesatuan ini (Haidar, 1994, 78).

Jumlah warga NU yang merupakan basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 juta orang, yang mayoritas di pulau Jawa, dengan beragam profesi, yang sebagian besar dari mereka adalah masyarakat desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran Aswaja. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.

Adapun landasan ideologis sikap dan prilaku politik NU sebagaimana yang ditulis Haidar (1994, 321-323) adalah bercirikan hal-hal sebagai berikut: 1) *Tasawuf* dan *i'tidal*, 2) Sikap *tasamuh*, 3) Sikap *tawazun*, dan 4) *Amar ma'ruf nahi munkar*. Disamping itu, NU juga mendasarkan segala prilaku sosial politiknya kepada pertimbangan beberapa kaidah fikih. Kaidah-kaidah itu adalah: 1) *Ma la yudraku kullub la yudraku kullub*, 2) *Dar' al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*, 3) *Idza ta'arada mafsadatani ru'iyā a'zamuha dararan bi irtikabi akhaffibima*, dan 4) *Al-hukmu yadurru ma'a illatibi wujudan wa 'adaman*.

Sejarah perkembangan NU menurut Fealy dan Barton (1997, xii-xv) dibagi dalam tiga fase: periode awal sebagai organisasi sosial keagamaan; periode tengah ketika ia, selain sebagai organisasi sosial keagamaan, juga berfungsi sebagai partai politik atau menjadi unsur formal dari sebuah partai; dan paling terakhir; kembali ke aktivitas-aktivitas keagamaan. Dalam sejarah politik Indonesia, keterlibatan NU dalam politik dimulai sejak tahun 1939, ketika bergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) suatu konfederasi tempat bersatunya organisasi-organisasi Islam yang dibentuk tahun 1937, langkah politik NU ini tidak lain untuk menentukan posisinya secara tegas terhadap penjajahan Belanda, pada masa kolonial ini kiprah NU semakin tampak dengan pemikiran dan aksi politiknya, baik nasional maupun internasional. Diantara manuver-manuver politiknya yang cukup menarik perhatian banyak kalangan adalah ketika Mukhtamarnya yang ke-14 tahun 1938 di Menes, Banten, pada saat itu NU menyatakan Hindia Belanda sebagai "*Dar al-Islam*" yang berarti negeri yang dapat diterima umat Islam (Muhtadi, 2004, 98).

Sekitar tahun 1945-an, NU baru memasuki politik formal sebagai unsur organisasi dari partai Islam Masyumi. Meningkatnya frustrasi terhadap dominasi kalangan modernis Masyumi mendorong NU keluar dari organisasi tersebut tahun 1952 (Fealy dan Barton, 1997, xiv). Kemudian ia mentransformasikan diri menjadi partai independen, dan muncul sebagai kontestan terbesar ketiga dalam pemilu 1955 dengan 18% perolehan suara (hanya 4% selisihnya dengan partai urutan pertama). Selama masa ini NU mempertahankan tingkat dukungan politik pada Pemilu berikutnya tahun 1971. Ia juga berpartisipasi dalam setiap kabinet dari tahun 1953 hingga 1971.

Masa Soekarno, Fealy dan Barton (1997) menulis, pada masa ini NU memperoleh reputasi karena pandangan politiknya yang fleksibel dan akomodatif. Selama tahun 1950-an hingga awal 1960-an, NU dalam kebijakan politiknya cenderung mempertahankan legitimasi pemerintah, termasuk salahsatunya penerimaan NU terhadap Demokrasi Terpimpin dari tahun 1957 hingga 1959, dan memberi julukan kepada Presiden Soekarno adalah *Walilyul Amri Dblaruri bisy Syaukah*.

Perubahan politik Nasional sekitar tahun 1965, bergabungnya NU dengan Militer dalam tragedi berdarah, pemberontakan PKI, NU bisa dibilang mempunyai andil besar terhadap naiknya Soeharto sebagai penguasa (Orde Baru). Selama Orde Baru berkuasa, ternyata

organisasi ini menjadi restriksi dan intimidasi dari de-islamisasi politik Orde Baru selama Pemilu 1971. Tahun 1973, ia dipaksa untuk berfusi dengan tiga partai Islam lainnya untuk membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada masa ini NU terlihat banyak melakukan oposisi terhadap pemerintah.

Tahun 1984, NU keluar dari PPP dan kembali kesetatusnya sebagai organisasi sosial keagamaan (Kembali ke *Khittab* 1926), hal ini disebabkan karena makin terpinggirkannya NU dalam PPP. Selain kembali ke *Khittab*, NU kembali membuat sejarah Baru dengan menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal. Sikap yang seolah sangat kritis dan konfrontatif terhadap pemerintah selama periode 1970-an (Fealy dan Barton, 1997), tiba-tiba berubah menjadi sangat akomodatif ketika memasuki tahun 1980-an.

Politik akomodatif NU, mewarnai kehidupan politik nasional berlangsung hingga 1998. Tragedi demonstrasi yang mengakibatkan tumbang rezim Orde Baru, dan melahirkan era reformasi, NU membuktikan kemampuannya untuk tetap bertahan dalam pergumulan sosial-politik masyarakat Indonesia. Kenyataan peran sosial-politik NU, membuktikan NU tetap hidup dalam kebesaran jama'ahnya dan progresifnya organisasi ini dalam membangun sendi-sendi *civil society* di Indonesia. Kondisi terakhir politik Indonesia, setelah kasus-kasus terorisme, yang mengakibatkan *image* Indonesia "negatif" di dunia internasional, NU tampil untuk memperbaiki citra politik Indonesia ke dunia internasional. NU hadir dalam konteks kampanye "Perang melawan terorisme", "Benturan peradaban", dan "Perang ide" (*war ideas*) yang diluncurkan imperium AS, disatu pihak, dan dalam konteks "*al-ghazw al-fiker*" (invasi pemikiran) yang diusung kelompok gerakan Islam kanan (fundamentalis atau radikal), peran NU sebagai organisasi Islam dengan orientasi moderat, membangun sebuah dialog pemikiran, dialog peradaban dalam rangka membangun harmonisasi hubungan Islam dan Barat.

Islam Moderat di Indonesia: Sikap Keberagaman NU dan Muhammadiyah

Islam sejak kemunculannya pada Abad 7 M (wahyu pertama turun tahun 610), membuat (Barat atau Kristendom) serba tak enak. Sampai zaman modern sekarang ini pandangan *stereotype* Barat terhadap dunia Islam masih saja terjadi. Pelbagai wacana

dikembangkan terutama yang berkaitan dengan hubungan Islam-Barat, bahkan pasca perang dingin sempat berkembang wacana Islam adalah musuh baru bagi Barat pasca komunisme runtuh. Peristiwa terorisme 11 September 2001 seolah membuktikan bahwa Islam identik dengan radikalisme dan dunia diingatkan bahaya kelompok Islam radikal yang mengedepankan pendekatan kekerasan (*violence*) dalam bentuk terorisme. Tentu, realitas ini mempengaruhi *image* Islam "negatif" di mata dunia.

Dalam kondisi semacam ini, Islam moderat saatnya harus bangkit, memelopori dialog antar peradaban, sebagai juru bicara yang menampilkan citra positif Islam. Dari sini Islam moderat diharapkan memiliki daya tawar peradaban (*civility bargaining*) yang relatif tinggi, bagi peradaban dunia secara menyeluruh, menampilkan Islam secara progresif, toleransi dan liberal. Banyak tema-tema yang diajukan oleh kalangan Islam liberal sebagaimana dicatat oleh Charles Kurzman (2001), menentang teokrasi, mendukung demokrasi, menghormati hak-hak perempuan, menghormati hak-hak non-muslim, dan kebebasan berpikir. Dan isu-isu menarik sebagaimana ditulis oleh Leonard Binder (2001), liberalisme Islam sebagai kritik terhadap ideologi-ideologi pembangunan.

Indonesia sebagai ikon negara muslim moderat di Asia Tenggara, karena sikap keberagaman mayoritas umat Islam di negeri ini yang menunjukkan sikap pluralis dan toleran. Bahkan hasil survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia), menyimpulkan bahwa mayoritas muslim di Indonesia tergolong moderat, karena orientasi politiknya sarat dengan nuansa keberagaman dan kebangsaan. (Wawasan, 25/08/2006). Fenomena radikalisme agama di Indonesia adalah kecenderungan baru di masa "Reformasi" yang hanya mewakili segelintir kecil umat Islam. Begitu pula aksi teroris yang sesungguhnya tidak mewakili karakter keberagaman Islam di Indonesia. NU dan Muhammadiyah bisa dikatakan sebagai representasi umat Islam di Indonesia. Sebab keduanya merupakan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang memiliki pengikut mayoritas dari umat Islam di Indonesia. Kedua ormas tersebut menjadi promotor dan pendukung Islam moderat di Indonesia.

Umat Islam di Indonesia, umumnya didasarkan pada "watak" atau "karakteristik" damai, ramah, dan toleran. Watak Islam seperti itu diakui banyak pengamat Barat, diantaranya Thomas W Arnold. Dalam bukunya "The Preaching of Islam", Arnold menyimpulkan bahwa

penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Berbeda halnya dengan penyebaran Islam di sebagian besar wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang biasa disebut sebagai fath atau futuh, yakni pembebasan, yang dalam prakteknya sering melibatkan kekuatan militer. Meskipun futuh di kawasan-kawasan yang disebutkan tadi tidak terjadi pemaksaan penduduk setempat untuk memeluk Islam, namun hal itu memiliki konsekuensi yang berbeda dengan karakter Islam di Indonesia.

Sikap moderat NU, diwarisi dari tradisi keilmuan *salaf as-salib* sekitar abad ke 20, melalui faham Aswaja yang telah dijadikan semacam "plat-form" bagi sikap moderat, terbuka, *tasamub*, toleran, *i'tidal* dan *tawazun* (Siradj, 1999, 196). Dan beberapa mazhab atau aliran yang dijadikan sikap dan cerminan NU, berdasarkan suatu keyakinan bahwa aliran-aliran tersebut mencerminkan Islam yang moderat; Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat-Nya. Dengan berpegang pada Aswaja, NU diformalisasikan oleh tokoh pendirinya sebagai upaya pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan, hal ini merupakan bukti konkret *concern* kelompok ini terhadap Islam yang berwawasan lokal dan memiliki apresiasi yang sangat tinggi terhadap tradisi.

Wacana Islam pribumi⁴ merupakan momentum bagi NU setelah kembali ke khittah 1926, telah mengantarkan salah satu organisasi keagamaan terbesar Indonesia ini ke posisi sangat strategis dan mengembangkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat umum dan umat Islam pada khususnya.

Dalam Muhammadiyah dikembangkan wacana Dakwah Kultural sebagaimana dikemukakan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Bali pada 24-27 Januari 2002. Dakwah kultural meliputi dua pintu utama: konvensional dan komunikasi. Yang

⁴ Gagasan Islam pribumi dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid sekitar akhir tahun 80-an. Dalam "Pribumisasi Islam" tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan kedalam kebudayaan yang dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Bagi Abdurrahman Wahid, Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Inti dari pribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya (Wahid, 2001, 111).

pertama menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah, khutbah, dialog interaktif dan kegiatan tabligh lainnya. Cara ini sudah berlangsung lama dan masih terus digunakan sampai saat ini. Yang kedua sebagai proses interaksi nilai dan saling mempengaruhi dalam rangka terjadinya perubahan pemahaman, keimanan dan pengamalan Islam secara individual; dan perubahan struktur dan norma kehidupan menuju masyarakat madani secara sosial.

Dakwah kultural yang dimaksud Muhammadiyah adalah orientasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan, menerima kearifan dan kecerdasan lokal, dan mencegah kemunkaran dengan memperhatikan keunikan sifat manusia secara individual dan sosial. Cara dakwahnya “memudahkan” dan “menggembirakan” demi tegaknya nilai-nilai Islam diberbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dengan ini berarti Muhammadiyah berupaya untuk menciptakan Islam yang sejuk dan bernuansa kultural serta menghargai multikulturalisme.

Sebagai representasi Islam moderat di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sepatutnya menjadi penengah, *“mediating role”* meminjam istilah Azra (2002, 116) dalam merespon gejala-gejala perkembangan wacana intelektual dan praksis keagamaan, sosial dan politik. Perang ide (*war ideas*) yang diluncurkan imperium AS disatu pihak (liberalisasi Islam), dan dalam konteks *“al-ghazw al-fiker”* (invasi pemikiran) yang diusung kelompok gerakan Islam kanan di pihak lain (fundamentalis atau radikal). Kedua kutub pemikiran tersebut sama-sama menampilkan penyeragaman cara berfikir, yang menyimpang dari tradisi beragama dan kultur bangsa Indonesia. Satu kutub berkiblat ke neo-liberalisme di AS; sementara kutub lainnya berkiblat ke Saudi Arabia. Yang pertama berbicara tentang liberalisasi Islam, dengan menggerus potensi kritis Islam sebagai agama populis dan pembebasan. Sementara yang terakhir berbicara tentang pemurian agama dan puritanisasi tatanan sosial-politik Indonesia, dengan mengabaikan kenyataan bahwa “kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam”, dan bukan “orang Islam yang tinggal di Indonesia”.

Mediating role menurut Azra (2002, 116) bisa diwujudkan melalui berbagai pendekatan dan cara, seperti penciptaan “jaringan kerja”, mengkomonikasikan warna-warni kehidupan dalam memandang agama, realitas politik, ekonomi dan kebangsaan, membuka ruang dialog dan diskursus rasional. Jika hal ini bisa diwujudkan oleh NU dan Muhammadiyah, maka pada gilirannya tidak

ada yang perlu dikhawatirkan dengan berbagai gejala dan bentuk praksis di kalangan umat Islam Indonesia.

Peran Masyarakat Sipil dalam Membangun *Image* Indonesia: Studi Terhadap Peran NU dan Muhammadiyah

Fenomena *civil society* merupakan isu penting dan menyita perhatian banyak pihak, termasuk di Indonesia sebagai pembentukan kondisi transisi menuju demokrasi. Hal ini tidak terelakkan, ketika rezim-rezim totaliter-komunis bertumbangan di Eropa Timur dan Tengah pada dasawarsa 80-an, banyak pihak menganggap bahwa hal itu merupakan keberhasilan eksprimen gerakan *civil society* (Asrori, 1999, 1-2). Namun demikian, ambruknya rezim totaliter di Eropa Timur dan Tengah tidak serta merta melahirkan rezim demokrasi. Fakta yang terjadi kemudian adalah ironi dan kontradiksi pascatotaliter, yang jauh lebih rumit dan keras, berupa konflik etnik maupun keagamaan. Situasi pascatotaliter ini ditandai dengan upaya ideologis dan kultural yang secara sistematis melakukan penetrasi ke dalam masyarakat dengan tujuan mendudukkannya di bawah dominasi negara (Muhammad AS Hikam, 1996, 86).

Sebagai sebuah konsep dan gagasan, *civil society* bukan barang baru. Dalam setiap masa dan setiap pemikir. Dalam penelitian Asrori (1999, 21-31), minimal terdapat lima model pemaknaan *civil society*, singkatnya sebagai berikut: *Pertama*, dan ini yang paling kuno, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dan identik dengan negara (*state*). Pemahaman demikian dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704 M). *Kedua*, pada paruh abad ke 18, Adam Ferguson (1767) memberi tekanan lain terhadap makna *civil society*. Bagi dia, *civil society* merupakan visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggungjawab sosial yang bercirikan solidaritas sosial, dan yang terilhami oleh sentimen moral serta sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. *Ketiga*, Thomas Paine (1792) mulai memaknai dalam posisi diametral dengan negara. Bahkan *civil society* dianggap sebagai entitas negara. *Keempat*, model Hegel, Marx dan Gramsci, yang oleh Hikam disebut sebagai "elemen ideologi kelas dominan". *Kelima*, sebagai reaksi atas model Hegelian, Alexis 'De Tocqueville mengembangkan *civil society* dengan

mendasarkan diri pada pengalaman Amerika. Ia memaknai *civil society* sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara.

Dalam pandangan Muhammad AS. Hikam (1996, 3), mengacu pada 'De Tocqueville di atas, *civil society* merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembada (*self-generation*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas, tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat.

Di Indonesia istilah *civil society* diartikan beragam, salah satunya diartikan "Masyarakat Sipil" dan "Masyarakat Madani". Masyarakat sipil dirumuskan sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai kebebasan, terdapat saling kepercayaan (*public trust*), kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan, dan kemandirian terutama ketika berhadapan dengan negara dan kekuatan kapital. Sedangkan masyarakat madani diartikan masyarakat yang beradab, mangacu kepada sebuah tatanan masyarakat yang dibangun Rosulullah di Madinah pada abad silam. Menurut Baso (1999, 246,) perbedaan pengertian di atas disebabkan karena ada semacam "egoisme" historis dan doktrinal dari gagasan "Masyarakat Madani" yang bisa berbenturan dengan ide-ide dasar "Masyarakat sipil" itu sendiri, dengan artian ada benturan tradisional antara pendukung "Masyarakat Madani" dari kalangan modernis dan "Masyarakat Sipil" dari kalangan tradisional (NU).

Adapaun relasi *civil society* dan demokratisasi, Asrori (1999, 32) mengibaratkan dua sisi mata uang, keduanya bersifat koeksistensi. Hanya dalam situasi demokratis, maka *civil society* bisa berkembang secara wajar. Larry Diamond (2003, 291-292) menambahkan, *civil society* memajukan demokrasi dengan dua cara; membantu menghasilkan transisi dari pemerintah otoriter ke (setidaknya) pemilu demokratis, serta memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi setelahnya. Sementara bagi Hikam (1996, 94-95), strategi penguatan

civil society sebaiknya ditujukan ke arah pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis-partisipatoris dan reflektif.

Menjadi cukup menarik mempertautkan *civil society* dengan kondisi mutakhir bangsa Indonesia, yang ditandai dengan konstalasi perubahan sosial-politik, dimana munculnya sebuah kenyataan yang agak kontradiktif: melemahnya kekuatan negara tanpa diimbangi oleh munculnya organisasi kemasyarakatan yang kuat, yang menyebabkan, seperti dinyatakan Goenawan Mohamad (2002, 30), politik nasional telah menjadi “a competition between disconnected desires.”

Dalam situasi di mana negara tak lagi mampu berartikulasi dengan maksimal, sementara *old social control*, meminjam istilah Migdal (1988, 93-96), tak lagi mempunyai daya, NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia, justru berperan sebagai kekuatan *civil society* yang signifikan. Situasi lemahnya baik negara maupun sistem kontrol sosial tradisional telah menimbulkan kekaburan orientasi dan tatanan kemasyarakatan, di mana kekuatan-kekuatan sosial-politik, ekonomi dan budaya bergerak tanpa arah. Maka, persis seperti dimiliki kaum militer, hanya NU dan Muhammadiyah-lah yang mempunyai kekuatan lebih terorganisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, keduanya secara potensial bisa tampil sebagai *the leading groups* dalam proses restrukturisasi pelataran keidupan sosial-budaya dan politik di atas, dimana negara dan kelompok-kelompok masyarakat berkinerja.

NU dan Muhammadiyah bisa bertindak sebagai wakil kekuatan-kekuatan nonnegara yang otoritatif, baik dalam berhadapan dengan negara pada tingkat domestik mau pun kekuatan-kekuatan “supra” pada tingkat internasional. Untuk sementara, potensi semacam ini telah mulai terlihat. Di satu pihak, sebagaimana telah disinggung di atas, suara-suara NU dan Muhammadiyah jauh dianggap mempunyai otoritas moral dan intelektual dibandingkan dengan hampir semua kekuatan-kekuatan politik resmi di Indonesia. Di pihak lain, walau tetap untuk kepentingan domestik Indonesia, suara keduanya bukan hanya telah juga menjadi referensi pada tingkat duta besar negara-negara Barat yang datang berkunjung dan berdialog di Inonesia.

Ada banyak peran-peran penting yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dalam rangka membangun *image* Indonesia, yang selama ini Islam Indonesia identik dengan radikalisme ataupun

terorisme, semua itu dalam rangka membangun politik Indonesia yang bermartabat baik dalam wilayah domestic maupun pada wilayah internasional. Peran-peran tersebut setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Melakukan Muhibah Kenegaraan

Pasca serangan 11 September 2001, langsung atau tidak telah mempengaruhi pandangan dunia terhadap Islam. Pada saat itu, muncul berbagai klaim sepihak, bahwa Islam telah melahirkan teroris yang membahayakan kehidupan dunia. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia pun merasa wajib memperbaiki citra Islam di mata dunia. Untuk itulah, PBNU merasa perlu untuk menjelaskan pada dunia bahwa Islam merupakan ajaran cinta damai secara langsung pada mereka yang mencurigai Islam. Itu pula sebabnya, Hasyim Muzadi pun melakukan muhibah ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Vatikan, Inggris, Jerman, dan Australia, untuk menjelaskan secara langsung tentang agama Islam (Kompas 3/3/ 2004).

Menurut Hasyim, apa yang dilakukan NU bukan sekadar untuk memperbaiki citra Islam di mata dunia, tetapi secara tidak langsung juga demi citra bangsa Indonesia. Apalagi, sampai saat ini dunia Islam masih mendapat sorotan negatif di mata dunia internasional, dan negara Indonesia pun tidak bisa menghindari kenyataan bahwa penduduknya juga banyak yang beragama Islam (Kompas 3/3/ 2004).

Respon NU terhadap maraknya terorisme berlabel agama dengan menggelar konferensi yang bermaksud meng-counter berkembangnya pengaruh Islam radikal di kalangan umat Islam pada umumnya, dan mencegah terbentuknya opini internasional yang mengidentikkan Islam dengan terorisme. "Deklarasi Jakarta 2001", yang merupakan hasil Summit of World Muslim Leaders mengungkapkan bahwa Islam adalah agama moderat yang cinta damai, antikekerasan, dan tidak antikemajuan. Kemudian The Jakarta International Islamic Conference (JIIC) yang dilaksanakan atas kerjasama NU-Muhammadiyah pada tanggal 13-15 Oktober 2003, yang kemudian melahirkan Center for Moderate Muslim (CMM). Konferensi ini ingin mempertegas peran Islam moderat Asia Tenggara yang direpresentasikan oleh NU, Muhammadiyah, dan

ormas-ormas Islam lainnya dalam meredam gelombang radikalisme yang melahirkan terorisme.

Dialog Peradaban

'Deklarasi Jakarta' pada tahun 2001 tersebut tidak hanya didominasi tokoh-tokoh Muslim, namun konferensi ini pun dihadiri para pemikir dari agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Beragamnya peserta untuk memperlihatkan komitmen para agamawan dan cendekiawan untuk mendialogkan berbagai persoalan yang menyangkut keagamaan serta masalah-masalah ekonomi dunia. Semua peserta setuju dan berharap, konferensi ini bisa membawa perubahan kearah penyelesaian konflik-konflik di dunia, terutama yang terkait dengan isu Islam.

Berbagai muhibah, konferensi atau diplomasi yang dilakukan NU dan Muhammadiyah tidak lain untuk menjelaskan kepada dunia, bahwa untuk mewujudkan perdamaian dunia adalah melalui dialog. Sejarah membuktikan, bahwa kekerasan tidak akan bisa menghasilkan kedamaian. Kekerasan hanya akan meninggalkan kebencian dalam masyarakat. Menurut Hasyim Muzadi, kalangan akademisi dan masyarakat awam di Eropa dan Amerika perlu mengubah sudut pandangnya terhadap Islam. Harus ada perbedaan antara usaha memahami Islam sebagai pandangan hidup dan sebagai gerakan. Usaha memahami Islam sebagai gerakan akan menyingkirkan faktor-faktor di luar agama Islam, padahal unsur lingkungan dan budaya sangat mempengaruhi. "Pemahaman seseorang terhadap Islam berbeda kualitasnya tergantung pemahaman teologi, kultural, dan lingkungannya," jelas Hasyim (Kompas 3/3/ 2004).

Membangun sikap keberagaman yang moderat di Indonesia.

Keberagaman yang moderat sudah lama ditunjukkan oleh kedua organisasi ini, hal ini ditandai bagaimana sangat akomodatifnya kedua organisasi ini terhadap lanskap sejarah politik Indonesia, walaupun terjadi benturan sana-sani. Akan tetapi setidaknya, penerimaan kedua organisasi ini terhadap pancasila merupakan tanda bahwa kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini berwawasan kebangsaan dan keindonesian. Bentuk-bentuk keprihatinan NU dan Muhammadiyah terhadap kondisi umat Islam Indonesia, bangsa dan Negara Indonesia, serta umat Islam seluruh dunia, kedua organisasi

ini mengeluarkan Pernyataan Bersama PBNU dan PP Muhammadiyah Menyambut Tahun Baru Hijriyah 1427 di Jakarta, 3 Muharram 1427 H/ 2 Februari 2006 (CMM, 16/02/2006), sebagai berikut:

1. PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah menyerukan peningkatan ukhuwah Islamiyah kepada seluruh kaum muslimin Indonesia melalui penguatan rasa kebersamaan di kalangan umat dan saling pengertian serta dialog mengenai hal-hal yang dianggap berbeda, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dan benturan sesama umat Islam.
2. PP. Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama menyerukan agar umat Islam meninggalkan cara-cara kekerasan, apalagi teror, yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan karakter dasar umat Islam Indonesia. Lebih dari itu, kekerasan dan terror hanya akan menimbulkan korban di kalangan kaum Muslim sendiri, serta memperburuk citra agama Islam dan umat Islam. Bahkan menguntungkan memuat Islamophobia yang akan mudah mendapatkan pembenaran dalam menstigmakan Islam sebagai agama yang kasar dan bengis, serta dapat memposisikan umat Islam Indonesia dan dunia dalam “killing ground”.
3. PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah menyerukan agar jihad umat Islam Indonesia ditujukan untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan, ekonomi, serta pengembangan sumber daya manusia. Jihad ditujukan untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, serta kemerosotan akhlak dan martabat manusia.
4. PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama menyerukan agar pelaksanaan syariat Islam di bumi Indonesia dilakukan secara Indonesiawi, melalui sistem dan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Keinginan untuk meletakkan agama secara berhadapan dengan negara, serta kekuasaan negara secara berhadapan dengan agama harus ditinggalkan jauh-jauh. umat Islam Indonesia justru sangat berkepentingan terhadap lestariannya pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
5. PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah menyerukan keserasian hubungan lintas agama di Indonesia, agar semua agama dapat berfungsi sebagai kekuatan kebangsaan dan

kenegaraan, serta tidak berubah menjadi problem bangsa dan negara.

6. PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama telah melakukan gerakan moral antikorupsi sejak tiga tahun lalu, dan sekarang telah membuahkan hasil kongkrit dengan lahirnya KPK. Oleh karenanya, gerakan antikorupsi sekarang ini dan seterusnya haruslah selalu mengetengahkan keadilan hokum dan keadilan moral, tidak pilih-pilih, dan tidak menjadi alat politik kekuasaan.
7. PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah menyerukan gerakan moral antipornografi dan pornoaksi secara serius dan sistemik, karena keduanya merupakan hal yang sangat berbahaya lantaran telah terbukti merusak moral dan ketahanan bangsa, khususnya generasi muda, yang menjurus pada pola hidup hedonistik. Dewasa ini pornografi dan pornoaksi telah menjadi alat untuk merontokkan tata budaya Indonesia dan telah menjadi kegiatan industri. Untuk itu DPR RI diminta agar segera menyelesaikan UU antipornografi dan pornoaksi demi kemaslahatan bersama.
8. PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama menyerukan kepada para negarawan, politisi, penyelenggara Negara, para pemimpin, untuk mengedepankan keteladanan kepada bangsa Indonesia, yang juga harus dimulai dari NU dan Muhammadiyah sendiri.

NU dan Muhammadiyah juga berhasil memainkan peranan penting sebagai kelompok masyarakat sipil dalam mengkampanyekan pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, Muhammadiyah dan NU telah mendirikan, sejak tiga tahun lalu, suatu gerakan moral anti korupsi. Selain itu, melalui ribuan sekolah dan perguruan tingginya dan melalui organisasi kepemudaannya yang mandiri, Muhammadiyah mengajarkan pendidikan tanpa kekerasan. (CMM, 26/2/2007)

Kesimpulan

Apabila NU dan Muhammadiyah berhasil memainkan peran sebagai kekuatan *civil society* di Indonesia, maka akibat-akibat positifnya jelas jauh lebih strategis dan bermakna serta lebih substansial dalam membangun image dan politik internasional. Islam di Indonesia

memang cukup prospektif. Ketika Islam telah diidentikkan dengan radikalisme dan dianggap tidak cocok dengan demokrasi, Indonesia telah mampu menepis stereotip semacam itu bahkan menunjukkan prestasi yang relatif membanggakan. Semua itu tidak lebih karena penguatan Islam moderat melalui NU dan Muhammadiyah, hal ini menyangkut kepentingan kelanjutan demokrasi dan keselamatan kemanusiaan secara keseluruhan.

Walaupun riak-riak konflik dan kekerasan masih membayangi suasana keamanan masyarakat Indonesia, namun tertangkapnya para pelaku kekerasan, baik karena motif agama maupun motif ekonomi dan politik, menjadi pertanda bahwa aparat keamanan berhasil dan mampu meredam gejolak radikalisme. Keberhasilan aparat keamanan itu juga tidak lepas dari dukungan tokoh-tokoh moderat Muslim, khususnya mereka yang giat mengampanyekan ajaran Islam yang toleran dan anti-kekerasan

Dengan demikian, kesadaran keberagaman umat Islam yang moderat artinya Islam yang berkeadilan dan penuh kedamaian perlu kita tanamkan untuk menggapai kesadaran Islam yang ramah bukan Islam yang marah. Pemahaman Islam yang kaffah dan bukan setengah-setengah. Dan gerakan Islam yang damai bukan gerakan Islam yang frontal dan penuh dengan warna kekerasan untuk mencapai kekuasaan. Semoga niat baik umat Islam moderat di Indonesia untuk membangun *image* Indonesia, bisa merambah ke negara-negara Muslim, untuk tercipta perdamaian dunia dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Akaha, Abduh Zulfidar et.al. (2002) *Terorisme Konspirasi Anti Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Alfian (1989) *Muhammadiyah: The Political Behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anam, Chairul (1994) *KHR. As'ad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Surabaya: Sahabat Ilmu.

- Barton, Greg Fealy dan Greg (ed.) (1997) *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nabdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Baso, Ahmad (1999) *Civil Society versus Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Binder, Leonard (2001) *Islam Liberal, Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bruinessen, Martin van (1994) *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Damam, Rozikin (2001) *Membidik NU Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*. Yogyakarta: Gama Media.
- Diamond, Larry (2003) *Developing Democracy, Toward Consolidation*, Terj., Yogyakarta: IRE Press.
- Haidar, M. Ali (1994) *Nabdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Hefner, Robert W. (2001) *Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Hikam, Muhammad AS. (1996) *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3S.
- Karni, Asrori S. (1999) *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*. Jakarta: Logos.
- Kurzman, Charles (2001) *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina.
- Ma'arif, Syafi'i (1986) *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Migdal, Joel S. (1988) *Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

- Mohammad, Goenawan (2002) “Visnu”, dalam Goenawan Mohammad, *Conversation with Difference*, terj. Jennifer Lindsay. Jakarta: PY Tempo Inti Media, Tbk.
- Muhtadi, Asep Saeful (2004) *Komunikasi Politik Nabdlatul Ulama, Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES.
- Noer, Deliar (1982) *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Sairin, Weinata (1995) *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Shihab, Alwi (1998) *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.